

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Savitri, Myrna dan Tristam Moeliono. 2010 : *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Huma, van Vollenhoeven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta.
- A, Siti Soetami. 1995 : *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2011 : *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alting, Husen. 2010 : *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Lkas Bang Press Indo, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011 : *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2017 : *Luas Lahan Kabupaten Pesisir Selatan 2016*, Adyta, Pesisir Selatan.
- Haar, Ter. 2001 : *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan K.NG. Soebakti Poespono), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2001 : *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakimi Dt. Rajo Penghulu, Idrus. 1997 : *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Hantoro, Novianto M. 2012 : *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003 : *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008 : *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hazairin. 1970 : *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Huijbers, Theo. 2007 : *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lontaan, J.U. 1975 : *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2008 : *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013 : *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988 : *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999 : *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moelino, Anton M. dkk. 2006 : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 1999 : *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2006 : *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Radhite Oryza Fea, Dyara. 2018 : *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta.
- Ruchiyat, Eddy. 1984 : *Politik Nasional Sampai Orde Baru*, Alumni, Bandung.
- Ruchiyat, Imam. 1992 : *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung.
- Samosir, Djamanan. 2013 : *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan.
- Santoso, Urip. 2012 : *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1980 : *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Soebekti dan Tamara. 1961 : *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soehino. 1998 : *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008 : *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996 : *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001 : *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008 : *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2010 : *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taneko, Soleman B. 1987 : *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung.
- Vollenhoven, Van. 1956 : *Ichtisar De Indonesier en zijn grond jilid 1*, (terjemahan Soewargono), Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Warman, Kurnia. 2006 : *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press, Padang.
- Warman, Kurinia. 2010 : *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- Warman, Kurnia dan Rachmadi. 2008 : *Masih "Jauh Panggang dari Api": Suatu Studi Penguatan Hak Ulayat Dalam Era Desentralisasi di Sumatera Barat*, Kerjasama Yayasan Kemala Jakarta dan World Resources Institute (WRI) dengan Qbar.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Ajudikasi.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### C. Sumber Lainnya

- Citrawan, Fitrah Akbar. 2020 : Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 3, 2020.
- Djatmiati, Tatiek Sri. 2002 : *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Dessy Ghea Herrayani, Lucky Faradila Soraya, dan Oemar Moechtar, 2019 : Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan

- Penataan Aset Reforma Agraria, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 41, Nomor 3, 2019.
- Eman. 2000 : Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, *Majalah Yuridika*, Volume 15, Nomor 3, 2000.
- Fatimah, Titin dan Hengki Andora. 2010 : Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2010.
- Fatmi, Siti Raga. 2018 : Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik, *Lentera Hukum*, Volume 5, Nomor 3, 2018.
- Gunanegara. 2022 : Penyelesaian BPHTB Terutang Sertipikat PTSL Pasca UU No. 1 Tahun 2022, *Lex Journalica*, Volume 19, Nomor 2, 2022.
- Hajati, Sri. 2004, *Aspek Yuridis Tanah Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan oleh Pihak Lain*, Makalah Seminar, Universitas Airlangga, Surabaya.  
<https://finance.detik.com/properti/d-5088367/sofyan-minta-tanah-ulayat-di-sumbar-segera-disertifikasi>  
<https://m.kumparan.com/nurul-firansyah/pendaftaran-tanah-ulayat-1uwAjbJnO2v/full>
- Inggir Deviandari, Kurnia Warman, dan Zefrizal Nurdin. 2021 : Pengadaan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Ketut Sudantra, I. 2018 : Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman, *Udayana Master Law Journal*, Volume 7, Nomor 4, 2018.
- Muchsin. 2006 : Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional, *Varia Peradilan Tahun XXI* Nomor 245 April 2006, Ikahi, Jakarta.
- Nurdin, Zefrizal. 2015 : Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, 2015.
- Ohorellah, H.M.G. 1993 : *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahmi Murniwati, Zefrizal Nurdin, dan Anton Rosari. 2021 : Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertipikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat, *Soumatara Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Ramadhani, Rahmat. 2019 : Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, Nomor 1, 2019.
- Sayuna, Inche. 2016 : *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siahaan, Maruarar. 2018 : Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat: Aspek Penting Pembangunan Indonesia Menuju Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume 9, Nomor 2, 2018.

- Sodiki, Achmad. 1994 : *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syahyuti, *Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*, dalam <https://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12/nilai-nilai-kearifan-pada-konsep.html>.
- Warman, Kurnia dan Hengki Andora. 2014 : Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 3, 2014.
- \_\_\_\_\_ dan Syofiarti. 2012 : Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat vs Pemerintah), *Artikel MMH*, Jilid 41, Nomor 3, 2012.
- Yulti, Ardinal. 2021 : *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

